

EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DUSUN UPING MUARA BATUQ KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT

Renaldy Adisaputra¹, Suharto², Achmad Taufik³

¹ Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

^{2,3} Dosen Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : renaldyadisaputra@gmail.com

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan dari K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Kecelakaan tidak sepenuhnya disebabkan tingkat kesadaran yang rendah, tetapi berkaitan dengan penerapan K3 dalam pekerjaan proyek yang belum maksimal. Dengan demikian, langkah Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mengendalikan keselamatan dan kesehatan pekerja sangat penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan jalan dusun Uping Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. Metode yang digunakan untuk pengambilan data yaitu metode kepustakaan dan metode kuisioner, metode pengambilan data tersebut dilaksanakan di lapangan. Sedangkan metode menggunakan rumus excel dan metode analisis static probabilitas dan dampak, dan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui risiko dari penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Kebijakan K3 (X1) dan K2 pada perusahaan masih kurang diterapkan dalam perusahaan sesuai dengan hasil analisis kuesioner penelitian 30 orang responden. Faktor Penghambat yang paling berpengaruh adalah indikator ada pengaruh pada proyek yang di kerjakan dalam penerapan mengenai K3 karena disesuaikan dengan standar yang ada dan pemberian sanksi kepada para pekerja yang tidak melaksanakan K3 atau tidak menggunakan alat pelindung diri juga dengan kategori sedang. Hal ini disebabkan penerapan sanksi belum maksimal.

Kata Kunci : Penerapan dan Faktor Penghambat Penerapan

ABSTRACT

Occupational safety and health (K3) is a field related to the health, safety, and welfare of people working in an institution or project site. The purpose of K3 is to maintain the health and safety of the work environment. K3 also protects co-workers, workers' families, consumers, and other people who may also be affected by working environmental conditions. Accidents are not entirely caused by a low level of awareness, but are related to the implementation of K3 in project work that has not been maximized. Thus, the evaluation step of the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) to control the safety and health of workers is very important. The purpose of this study was to evaluate the application of the

Occupational Health and Safety Management System (SMK3) on the road construction project of Uping Muara Batuq Hamlet, Mook Manaar Bulatn District, West Kutai Regency.

The method used for data collection is the library method and the questionnaire method, the data collection method is carried out in the field. While the method uses the excel formula and the static probability and impact analysis method, and then analyzed to determine the risk of this research.

The results of the study indicate that the application of K3 (X1) and K2 policies in the company is still not implemented in the company according to the results of the analysis of the research questionnaire of 30 respondents. The most influential inhibiting factor is the indicator that there is an influence on the project being carried out in the application of K3 because it is adjusted to existing standards and sanctions for workers who do not carry out K3 or do not use personal protective equipment also in the moderate category. This is because the application of sanctions has not been maximized.

Keywords: Implementation and Inhibiting Factors Implementation

PENDAHULUAN

Proyek konstruksi memiliki sifat khas seperti lokasi terbuka yang dipengaruhi cuaca, jangka waktu terbatas, penggunaan pekerja yang belum terlatih, dan peralatan berbahaya, meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai pedoman bagi semua pihak terlibat. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja serta melindungi semua yang terpengaruh di lingkungan kerja. Kecelakaan dalam konstruksi sering disebabkan oleh kurangnya penerapan K3. Oleh karena itu, evaluasi SMK3 penting untuk mengendalikan keselamatan pekerja. Penelitian ini mengevaluasi penerapan SMK3 pada proyek konstruksi Jalan Dusun Uping Muara Batuq di Kutai Barat, menyoroti perlunya perhatian pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap proyek konstruksi.

Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerapan K3 pada pekerjaan proyek Jalan Dusun Uping Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.

METODE

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau akan dibahas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan media cetak lainnya.
2. Menyebarkan Kuesioner dengan pihak kontraktor dan pekerja lapangan yang terkait dan terlibat pada kegiatan proyek pembangunan jalan dusun Uping, Muara Batuq kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.

Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan cara kuantitatif, yaitu hasil survey berupa kuisioner dan wawancara dari pakar dan responden diolah sesuai dengan metode Skala Likert yang digunakan. Skala dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan skala *multiple item* yaitu skala yang dipergunakan untuk mengukur, sikap terhadap suatu objek dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan, sikap ini di nyatakan dengan setuju atau tidak setuju. Penilaian responden terhadap atribut tanggapan dalam penelitian ini diberi nilai sebagai berikut :

STS : Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

TS : Tidak Setuju diberi skor 2

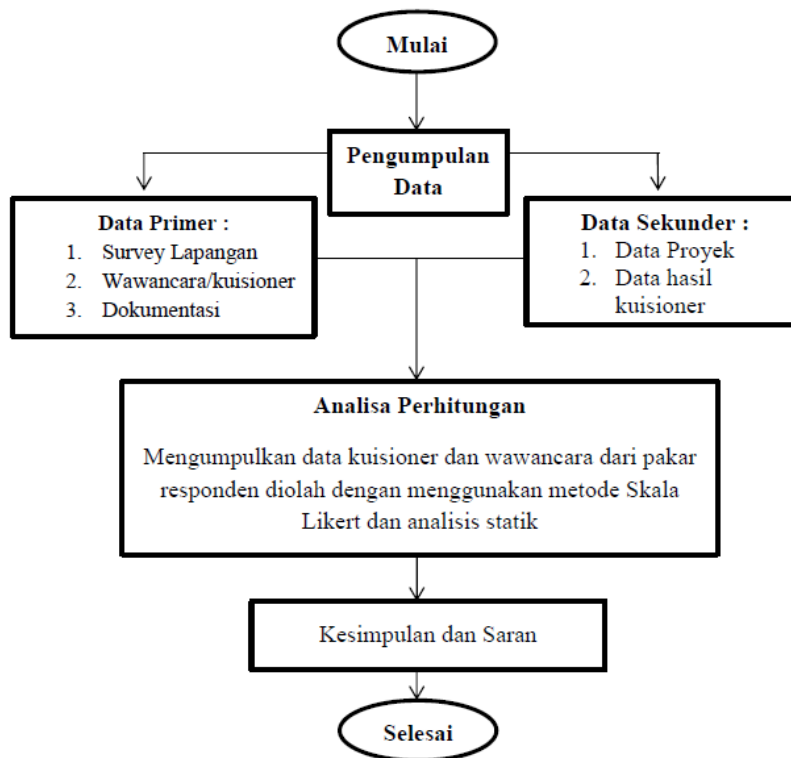
KS : Kurang Setuju diberi skor 3

S : Setuju diberi skor 4

SS : Sangat Setuju diberi skor 5

Desain Penelitian

Adapun prosedur penelitian dibuat bagan alir penelitian (*flow chart*) pada seperti disajikan pada gambar 3.2 berikut ini:



Gambar 3.3. Bagan alur penelitian

ANALISA PEMBAHASAN

4.3.2 Analisis Dampak Pengaruh

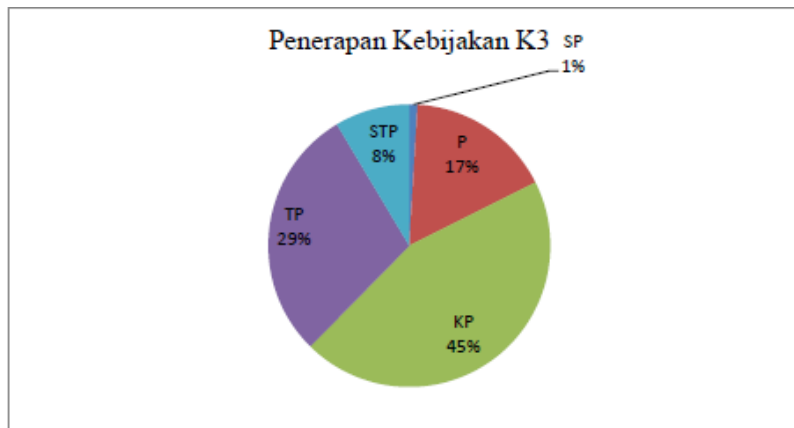
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari setiap butir-butir pertanyaan maka dapat dijelaskan oleh tabel-tabel berikut ini

Tabel 4.8 Persentase rata-rata kuesioner responden

Penerapan Kebijakan K3 (X1)	Jawaban									
	SP	%	P	%	KP	%	TP	%	STP	%
X1.1	1	3,333	9	30	9	30	11	36,667	0	0
X1.2	1	3,333	6	20	9	30	13	43,333	1	3,333
X1.3	0	0	0	0	23	76,667	6	20	1	3,333
X1.4	0	0	6	20	18	60	5	16,667	1	3,333
X1.5	0	0	5	16,667	9	30	13	43,333	3	10
X1.6	0	0	0	0	9	30	10	33,333	11	36,667
X1.7	0	0	9	30	17	56,667	3	10	1	3,333
Jumlah	2	6,667	35	1,166,687	94	313,333	61	203,333	18	60
Persentase	0,90%		16,7%		44,7%		29,2%		8,6%	
Persentase Terbesar	44,7%									

Sumber : Hasil Survei, 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Pertanyaan Penerapan Kebijakan K3 (X1) yang menjawab : (Sangat Penting = 0,9%), (Penting = 16,7%), (Kurang Penting = 44,7%), (Tidak Penting = 29,1%) dan (Sangat Tidak Penting = 8,6%), dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.3 Grafik Hasil Survei Kuesioner

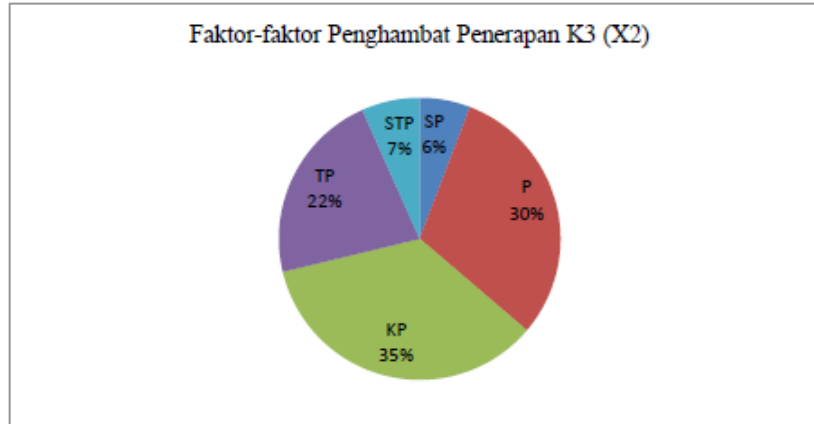
Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari survey 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Kebijakan K3 berdampak Kurang Penting pada perusahaan dikarenakan persentase terbesar responden menjawab Kurang Penting yaitu 44,7%.

Tabel 4.9 Persentase rata-rata kuesioner responden

Faktor-faktor Penghambat Penerapan K3 (X2)	Jawaban									
	SP	%	P	%	KP	%	TP	%	STP	%
X2.1	0	0	14	46,667	9	30	5	16,667	2	6,667
X2.2	0	0	11	36,667	12	40	6	20	1	3,333
X2.3	8	26,667	7	23,333	13	43,333	1	3,333	1	3,333
X2.4	1	3,333	11	36,667	9	30	7	23,333	2	6,667
X2.5	4	13,333	8	26,667	13	43,333	5	16,667	0	0
X2.6	1	3,333	10	33,333	4	13,333	11	36,667	4	13,333
X2.7	0	0	3	10	11	36,667	12	40	4	13,333
X2.8	0	0	9	30	13	43,333	6	20	2	6,667
Jumlah	14	46,667	73	243,333	84	280	53	176,667	16	53,333
Persentase	5,8%		30,4		35%		22,1		6,7%	
Persentase Terbesar	35%									

Sumber : Hasil Survei, 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Pertanyaan Faktor-faktor Penghambat Penerapan K3 (X1) yang menjawab : (Sangat Penting = 5,8%), (Penting = 30,4%), (Kurang Penting = 35%), (Tidak Penting = 22,1%) dan (Sangat Tidak Penting = 6,7%), dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.4 Grafik Hasil Survei Kuesioner

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari survey 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor Penghambat Penerapan K3 berdampak Kurang Penting pada perusahaan dikarenakan persentase terbesar responden menjawab Kurang Penting yaitu 35%.

4.5 Analisis Risiko dan Penelitian Faktor Penghambat K3

Untuk mengetahui faktor penghambat apakah yang memberikan pengaruh terbesar pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka dilakukan analisis dengan melihat tabel hasil kuesioner sebagai berikut ;

No	Variabel	Indikator	Kode	Probabilitas		Dampak		Skala	Tingkat Resiko
				Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata		
1	Penerapan Kebijakan K3 (X1)	Pekerja memperoleh pelatihan penggunaan kelengkapan keselamatan	X1.1	61	2	90	3	6	Rendah
		Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada setiap pekerja.	X1.2	57	2	83	3	6	Rendah
		Perusahaan memiliki dan menyimpan	X1.3	82	3	82	3	9	Sedang

		perusahaan tempat anda bekerja berpengaruh terhadap penerapannya di lapangan							
2	Faktor-faktor penghambat penerapan K3 (X2)	Jika pada proyek ini perusahaan memberikan atau menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerja. Apakah akan berpengaruh terhadap penerapannya di lapangan	X2.3	114	4	110	4	16	Tinggi
		Menurut anda, apakah dengan menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar memiliki pengaruh bagi para pekerja dalam diterapkannya keselamatan dan	X2.4	89	3	92	3	9	Sedang
		kesehatan kerja							
		Apakah berpengaruh jika pada proyek yang anda kerjakan penerapan mengenai K3 di sesuaikan dengan standar yang ada	X2.5	90	3	83	3	9	Sedang

	Dapatkah berpengaruh terhadap penerapannya, jika pihak memberikan sanksi kepada para pekerja yang tidak melaksanakan K3 atau tidak menggunakan alat pelindung diri	X2.6	108	4	73	2	8	Sedang
	Apakah dengan adanya unit yang mengurus tentang K3 diperusahaan tempat anda bekerja berpengaruh	X2.7	77	4	89	3	12	Sedang
	dilapangan							

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Untuk mengetahui seberapa besar risiko yang timbul dari pelaksanaan K3 maka di bawah ini diuraikan risiko terhadap masing-masing variabel. Yaitu risiko terhadap penerapan kebijakan (X1) dengan jumlah indikator ada 7 dan risiko terhadap faktor penghambat (X2) dengan jumlah indikator ada 7. Semua data diperoleh dari penilaian responden berjumlah 30 orang, dari nilai probabilitas dan nilai dampak. Dalam menentukan dampak yang terjadi diperusahaan, berpedoman pada parameter skala dampak dibawah ini:

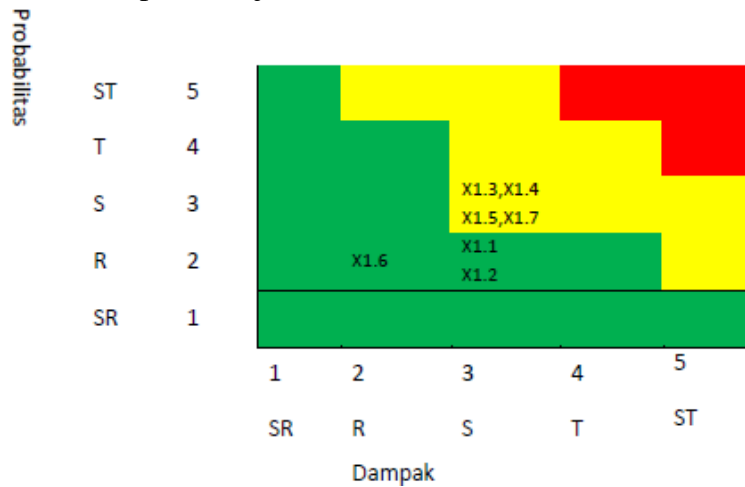
Tabel 4.11 Parameter Penilaian Risiko

No.	Keterangan	Kode	Interval Penilaian
1	Rendah	R	0 – 8
2	Sedang	S	9 – 17
3	Tinggi	T	18 – 25

Sumber : PMBOK Guide, 2004

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai risiko untuk variabel penerapan kebijakan dan faktor penghambat kebijakan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Risiko Penerapan Kebijakan



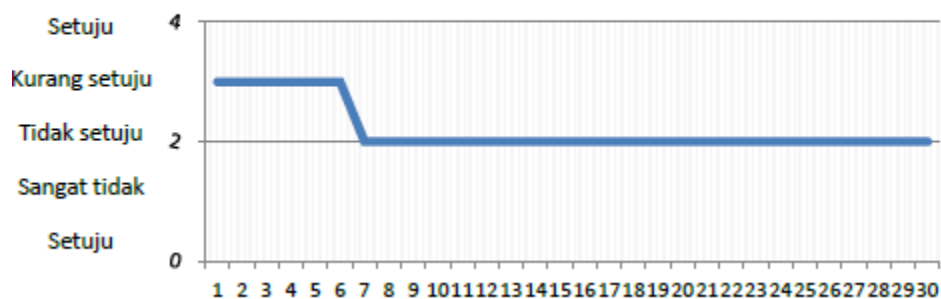
2. Rekapitulasi Faktor Penghambat Penerapan



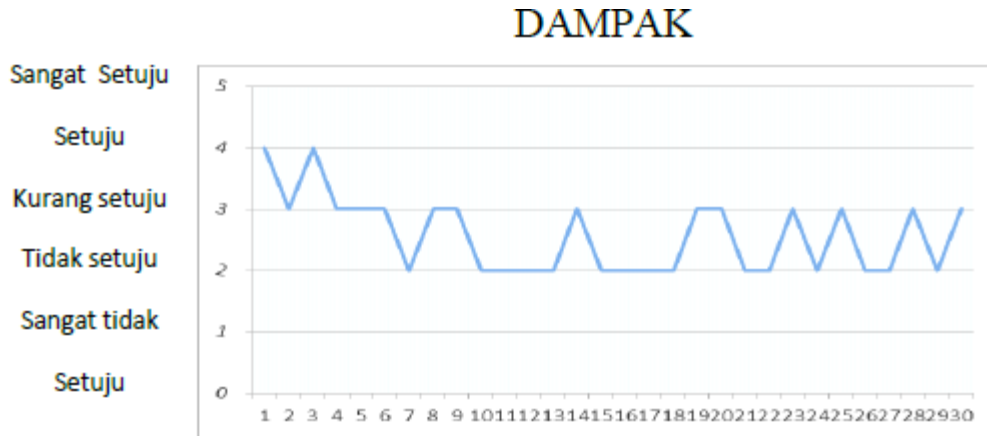
Untuk mengetahui perbandingan hasil kuesioner dari 30 responden maka dapat dilihat pada grafik berikut ini terdiri atas 2 variabel yaitu X1 dan X2 yang diambil berdasarkan nilai rata-rata jawaban probabilitas, dampak dan resiko yang telah dibulatkan dari setiap indikator pertanyaan.

1. Penerapan Kebijakan K3 (X1)

PROBABILITAS

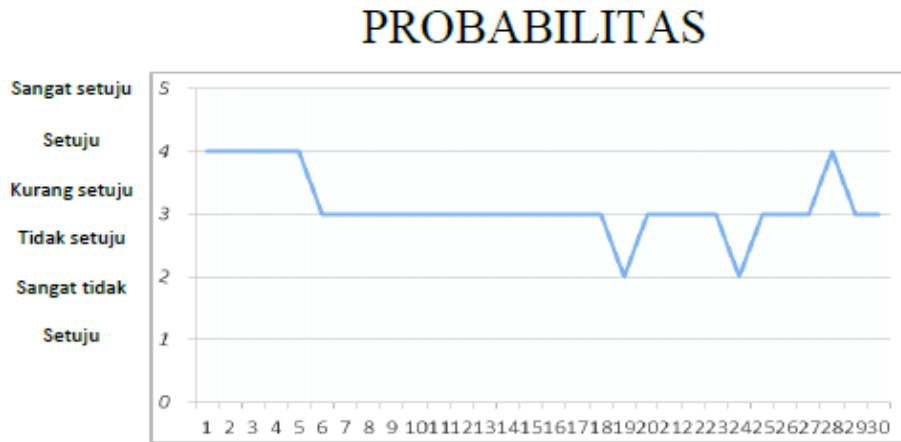


Gambar 4.5 : Grafik Probabilitas Penerapan Kebijakan K3 (X1)

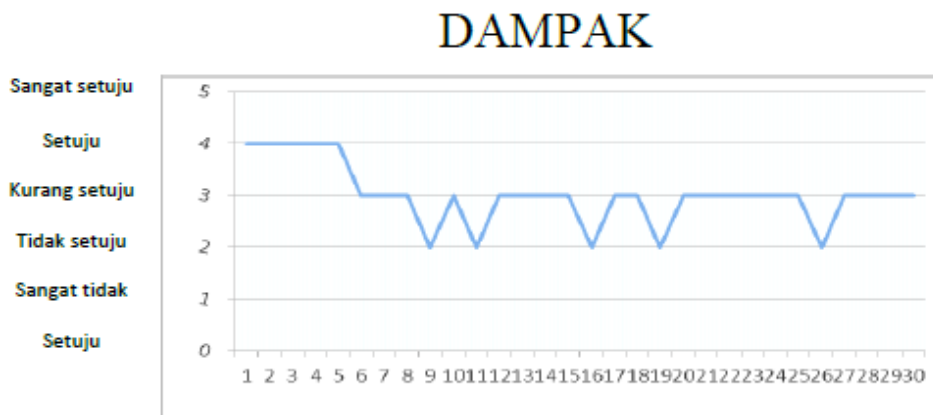


Gambar 4.6 : Grafik Dampak Penerapan Kebijakan K3 (X1)

2. Faktor-faktor Penghambat Penerapan K3 (X2)



Gambar 4.7 Grafik Probabilitas Faktor-faktor Penghambat Penerapan K3 (X2)



Untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruh resiko yang ditimbulkan oleh indikator pertanyaan pada serial variable maka digunakan skala resiko sebagai berikut ;

Sangat Tinggi = Skala 19 – 25

Tinggi = Skala 13 - 18

Sedang = Skala 7 - 12

Rendah = Skala 1 – 6

Perhitungan resiko diperoleh melalui hasil perkalian antara nilai rata-rata probabilitas dan dampak yang telah dibulatkan pada hasil jawaban kuesioner 30 orang responden. Untuk mengetahui hasil perhitungan resiko dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
 Dari grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel dengan indikator resiko sangat tinggi, sedangkan indikator dengan resiko tinggi



Gambar 4.9 : Grafik Resiko

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari data penelitian analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan Jalan Dusun Uping, Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat ;
 - a. Penerapan kebijakan K3 (X1) pada perusahaan masih kurang diterapkan dalam perusahaan sesuai dengan hasil analisis kuesioner penelitian 30 orang responden
 - Hasil kuesioner kepada responden di dapat nilai terbesar 44,7%, menjawab kurang setuju, maksudnya penerapan kebijakan K3 masih kurang di terapkan di perusahaan
 - b. Dari hasil pembahasan diperoleh urutan rangking-rangking tiap faktor yang menjadi penghambat diterapkannya K3 pada proyek pembangunan Jalan Dusun, Muara Batuq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut ;
 - Kurangnya pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 memiliki tingkat resiko rendah
 - Tidak disediakan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja memiliki tingkat resiko tinggi
 - Kurangnya kepedulian dari para pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar memiliki tingkat resiko sedang
 - K3 yang diterapkan tidak sesuai dengan standar yang ada memiliki tingkat resiko sedang
 - Tidak adanya sanksi bagi para pekerja yang tidak melaksanakan K3 memiliki tingkat resiko sedang

- Tidak adanya unit yang khusus yang mengurus tentang K3 memiliki tingkat resiko sedang
2. Faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah variabel X2.3 dengan nilai resiko 16 dan dikategorikan tinggi yaitu “tidak disediakannya alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja”.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan atau kontraktor yang ada adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pelatihan Manajemen K3 agar semua pihak yang bertanggung jawab di perusahaan mempunyai kemampuan yang cukup dan mengetahui tentang manajemen K3. Karena tidak semua karyawan/pekerja yang bekerja di perusahaan atau kontraktor yang mengetahui tentang manajemen K3.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai agar dilakukan rapat teknis untuk menyatukan persepsi sehingga Sistem Manajemen K3 dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2014 pasal 1 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum meliputi Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU

DAFTAR PUSTAKA

- Austen, A.D dan Neale, R.H. 1991. *Memajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Armanda D, 2006, *Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi*, Jakarta
- Ervianto, W.I. 2007. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*, Jakarta.
- Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MEN/1986 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 1966 tentang *Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 Tentang *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*, Jakarta.
- Perusahaan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*, Jakarta.
- Ridley J. 2004. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Ramli, S. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, OHSAS 18001, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang *Ketenaga-kerjaan*, Jakarta.